

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dalam Bab ini akan diuraikan gambaran pelayanan SKPD Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene sebagai berikut :

2.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene mengatur Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Organisasi, serta Peraturan Bupati Majene Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majene Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene sebagai berikut :

a. Kedudukan :

Kedudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan di bidang kependudukan dan keluarga berencana daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok :

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah dan atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

c. Fungsi Organisasi :

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah mempunyai fungsi mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina dan memberdayakan unsur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, meliputi :

1. Perumusan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah.
2. Pengorganisasian renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah.
3. Pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah.
4. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah.
5. Evaluasi pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah.
6. Pelaporan hasil pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah.

7. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan tentang pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program kerja jangka panjang dan program kerja menengah kewenangan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah.
8. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan daerah.

d. Susunan dan Struktur SKPD.

Susunan dan Struktur SKPD Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.

c. Bidang Data dan Informasi membawahkan :

1. Sub Bidang Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga dan Informasi;
2. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi :

1. Sub Bidang Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;
2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.

e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi :

1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Bina Ketahanan Keluarga;
2. Sub Bidang Advokasi dan Penggerakan Institusi Masyarakat.

f. Bidang Pengendalian Penduduk :

1. Sub Bidang Penyusunan Penetapan Parameter Penduduk dan Kerjasama Pendidikan Kependudukan;
2. Sub Bidang Pengendalian dan Analisis Dampak Kependudukan.

g. UPTD

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene nampak pada gambar berikut :

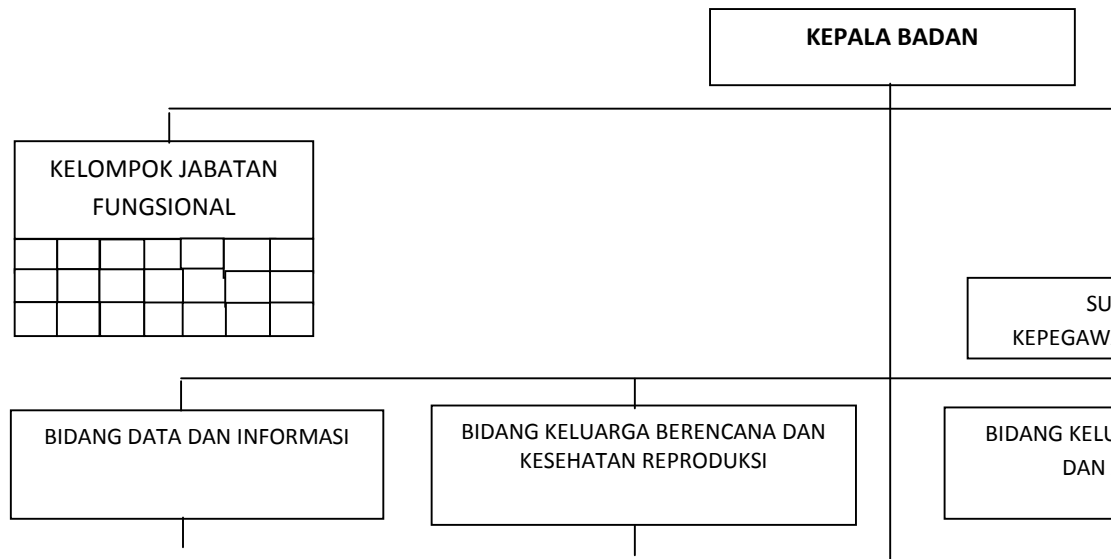
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

**NOMOR : 6
TANGGAL : 27**

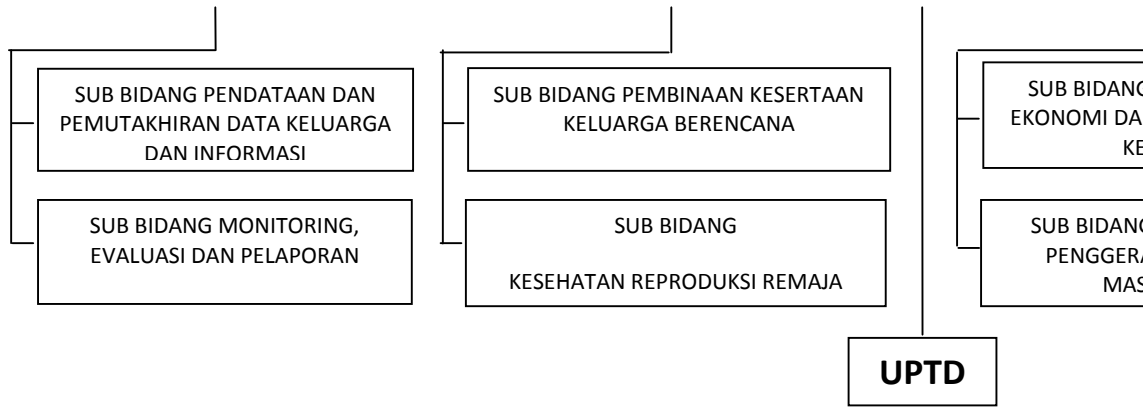
NOPEMBER 2013

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**

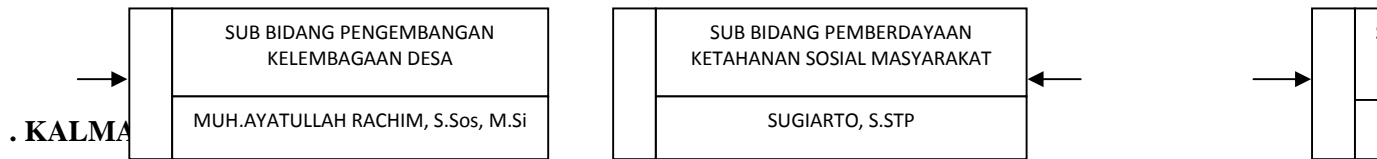
**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN
MAJENE**



LANJUTAN :



UPATI MAJENE



UPTD

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Analisis Kepegawaian

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene. Jumlah pegawai negeri sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene pada posisi tahun 2014 sebanyak 41 orang, dengan rincian adalah sebagai berikut :

I. Berdasarkan golongan

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Gol. I	-	
2.	Gol. II	7	
3.	Gol. III	30	
4.	Gol. IV	4	
	Total	41	

II. Berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	SD	-	
2.	SLTP	-	
3.	SLTA	14	
4.	Sarjana Muda/DIII	1	
5.	Sarjana (S.1)	22	
6.	Master (S.2)	4	
7.	Doktor (S.3)	-	
	Total	41	

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene sebagai salah satu

organisasi pemerintahan menempati gedung kantor yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 160 Lembang Kabupaten Majene (Jalan Poros Majene – Mamuju).

Data sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene dalam memberikan pelayanan publik pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

2.2.3. Gambaran Umum Bidang-Bidang

2.2.3.1. Bidang Data dan Informasi

Bidang data dan informasi merupakan salah satu bidang pada BKKBD Kabupaten Majene yang berperan dalam melakukan analisis program, pencatatan pelaporan dan melakukan penyediaan data berupa informasi keluarga melalui hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan setiap tahun.

Penyediaan data dan informasi digunakan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian operasional, evaluasi dan penilaian serta peta kerja operasional yang bermanfaat dalam peningkatan dukungan dan pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di semua tingkatan wilayah.

Dengan ruang lingkup dan dimensi yang semakin luas serta semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi menuntut upaya pengerahan potensi yang ada, baik berupa daya, dana, sarana maupun kemampuan manajemen yang dapat mengarahkan segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan program secara efektif dan efisien.

Sementara itu, keberhasilan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selama ini tidak terlepas dari tersedianya data dan informasi perkembangan program secara terus menerus, cepat, tepat dan akurat.

Salah satunya adalah dengan tersedianya data basis keluarga dan data individu anggota keluarga yang dapat memberikan gambaran secara tepat dan menyeluruh tentang ciri

maupun keadaan umum yang berkaitan dengan kondisi serta potensi keluarga. Tentang hasil – hasil pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di lapangan, data dan informasi keluarga berbasis data mikro tersebut dihasilkan melalui kegiatan pendataan keluarga yang dilaksanakan satu kali setahun di seluruh wilayah Indonesia.

Tujuan secara umum dalam hal pendataan keluarga yaitu, diperolehnya Data Basis Keluarga dan Anggota Keluarga yang dapat memberikan gambaran secara tepat dan menyeluruh tentang keadaan di lapangan sampai ke tingkat Keluarga tentang hasil pelaksanaan Program Keluarga Berencana yang dapat digunakan untuk kepentingan operasional langsung di lapangan serta untuk kepentingan penetapan kebijakan, perencanaan dan penilaian oleh pengelola dan pelaksana di semua tingkatan.

Sedangkan secara khusus, pendataan Keluarga berfungsi untuk menghasilkan data dan informasi tentang data :

- a. Demografi
- b. Keluarga Berencana (KB)
- c. Tahapan Keluarga Sejahtera

Sasaran Pendataan Keluarga adalah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang mencakup 5 (lima) aspek yaitu :

1. Aspek Demografi
2. Aspek Keluarga Berencana (KB)
3. Aspek Tahapan Keluarga Sejahtera
4. Aspek Individu Data Keluarga

5. Aspek Mutasi Data Keluarga/Individu

Jangkauan Pendataan Keluarga meliputi RT, Dusun/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai ketinggian Nasional

Data yang dikumpulkan melalui pendataan keluarga bermanfaat untuk Penetapan Sasaran, Pembuatan Peta Keluarga, Pencatatan Program, dukungan dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera, kepentingan Program Pembangunan Keluarga Sejahtera, kepentingan Program Pembangunan sektor – sektor lain dan merencanakan, memantau maupun menilai program lain.

2.2.3.1.1. Langkah – langkah dan Mekanisme Pelaksanaan pendataan keluarga

Mengacu pada pengalaman dan potensi Sumber Daya Manusa (SDM), maka Pendataan Keluarga dilaksanakan secara berjenjang. Mulai dari tingkat RT (Rukun Tetangga) sampai ketinggian Kabupaten guna tertib dan lancarnya pelaksanaan serta mendapatkan data yang akurat dan terkontrol.

Untuk mencapai hasil Pendataan Keluarga yang memuaskan, maka sebelumnya diadakan kegiatan berupa Pelatihan / Sosialisasi dalam hal pelaksanaan Pendataan Keluarga kepada Pelaksana Teknis di Lapangan / Kecamatan yaitu 8 orang Kepala UPTD dan 5 orang Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB)

Pelaksanaan Pendataan dan Pemetaan ini terdiri dari unsur yang terkait sebagai berikut :

1. Pelaksana Pengumpulan Data / Pewawancara Pengumpul Data dan Pewawancara.

Dilaksanakan oleh Institusi Masyarakat yaitu PPKBD dan Sub. PPKBD di tingkat RT dan Lingkungan, Dusun/RW masing – masing.

2. Pembina Pengumpul Data

Pengumpulan Data atau Pembina Pengumpul Data dilaksanakan oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB / PLKB) di tingkat Desa / Kelurahan atau wilayah kerja masing – masing PLKB/PKB.

3. Penanggung Jawab Pengumpulan Data

Tanggung Jawab pelaksanaan pengumpulan data oleh para ketua RT, Dusun/Lingkungan, RW dan para Kepala Desa/Kelurahan setempat, yang dikoordinir oleh para PLKB/PKB.

4. Pengawas Pengumpulan Data

Pengawas pelaksana pendataan keluarga oleh pengendali PLKB/PKB atau para Kepala UPTD masing – masing Kecamatan yang dikoordinir oleh Camat setempat.

5. Petugas Pembuat Peta Keluarga

Pembuatan Peta Keluarga sesuai Hasil Pendataan Keluarga yang telah dilaksanakan oleh PPKBD/Sub PPKBD, maka tanggung jawab pembuatan Peta adalah Penyuluh KB/PLKB setempat. Untuk sementara pembuatan Peta Keluarga Tahun 2013 hanya dilaksanakan di 2

dusun/RW dari setiap desa/Kelurahan yg ditunjuk sebagai wilayah percontohan di setiap kecamatan.

6. Pengelola Data

Data Hasil Pendataan Keluarga dikelola oleh petugas – petugas pada tingkatan Wilayah masing – masing yaitu :

- a. Tingkat Desa / Kelurahan dikelola oleh PKB/PLKB.
- b. Tingkatan Kecamatan dikelola oleh Kepala Unit Pelaksana Tehnis (UPTD).
- c. Tingkatan Kabupaten dikelola oleh Kabupaten / Kota, dalam hal ini pelaksanaannya pada Bidang Data dan Informasi Sub bidang Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene.

2.2.3.1.2. Arus Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga

1. Waktu pelaksanaan Pendataan Keluarga dimulai tanggal 1 Juli sampai pada tanggal 30 September setiap tahun.
2. Membuat Laporan mingguan Pelaksanaan Pendataan Keluarga (Laporan Posko) dimulai bulan Juli Minggu I tanggal 2 Juli s/d tanggal 8 Juli sampai dengan Minggu XIII Tanggal 24

September s/d tanggal 30 September (selama 3 bulan).

3. Laporan Pendataan Keluarga Tingkat Dusun/Lingkungan oleh Sub. PPKBD ke PPKBD dengan model Format Rek.Dus.R/I/KS/08 dan Rek.Dus.R/I/Kel.Pra S-KSI/08 dikirim PPKBD per- tanggal 14 Oktober setiap tahun.
4. Laporan Pendataan Keluarga Tingkat Desa/Kelurahan oleh PPKBD ke PLKB/PKB dengan model Format Rek.Des.R/I/KS/08 dan Rek.Des.R/I/Kel.Pra S-KSI/08 dikirim PLKB/PKB per- tanggal 21 Oktober setiap tahun.
5. Laporan Pendataan Keluarga Tingkat Kecamatan oleh Kepala UPTD Kecamatan ke SKPD KB Kabupaten dengan model Format Rek.Kec.R/I/KS/08 dan Rek.Kec.R/I/Kel.Pra S-KSI/08 dikirim Kepala UPTD Kecamatan per- tanggal 28 Oktober setiap tahun.
6. Laporan Pendataan Keluarga Tingkat Kabupaten oleh SKPD KB Kabupaten ke BKKBN Provinsi Sulawesi Barat dengan model Format Rek.Kab.R/I/KS/08 dan Rek.Kab.R/I/Kel.Pra S-KSI/08 dikirim per- tanggal 5 November atau selambat – lambatnya tanggal 12 November setiap tahun. Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kabupaten sudah harus diterima oleh BKKBN

Pusat secara online melalui Program Aplikasi & Server.

2.2.3.1.3. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam pemilihan indikator dan variabel dalam pengembangan Analisis Hasil pendataan Keluarga ini adalah Rek.Kab.R/I/KS/07. Data ini berada ditingkat Kabupaten sebagai rekapitulasi hasil pendataan keluarga pada wilayah – wilayah cakupan di Kabupaten Majene.

2.2.3.1.4. Jenis Indikator dan Variabel

Aspek dan Indikator yang dipakai dalam pengembangan model Analisis Data Basis Keluarga ada 3 Aspek atau Indikator yaitu Demografi, Keluarga Berencana dan Tahapan Keluarga.

1. Aspek Demografi

Variabel – variable yang mencerminkan Aspek Demografi adalah :

- a. Cakupan wilayah.
- b. Persentase Kepala Keluarga menurut jenis kelamin terhadap jumlah kepala keluarga.
- c. Persentase kepala keluarga menurut status perkawinan terhadap jumlah kepala keluarga.
- d. Persentase kepala keluarga menurut status pekerjaan terhadap jumlah kepala keluarga.

- e. Persentase kepala keluarga menurut tingkat pendidikan terhadap jumlah keluarga.
- f. Persentase partisipasi anak usia 7-15 tahun dalam pendidikan menurut jenis kelamin.
- g. Rata-rata jiwa dalam keluarga.
- h. Rasio jenis kelamin anggota keluarga.
- i. Persentase jiwa menurut kelompok umur terhadap jumlah jiwa.
- j. Rasio anggota keluarga usia 0-5 tahun terhadap WUS serta partisipasinya dalam kegiatan posyandu.
- k. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap Wanita Usia Subur (WUS).

2. Aspek Keluarga Berencana

Variabel – Variabel yang mencerminkan Keluarga Berencana antara lain :

- a. Persentase Pasangan Usia Subur menurut umur Istri terhadap jumlah Pasangan Usia Subur.
- b. Persentase peserta KB terhadap jumlah Pasangan Usia Subur dengan nilai prevalensinya.
- c. Persentase bukan peserta KB dan Unmeet need terhadap jumlah Pasangan Usia Subur.

3. Aspek Tahapan Keluarga Berencana

- a. Persentase Keluarga Pra Sejahtera terhadap Jumlah Keluarga.

- b. Persentase Keluarga Sejahtera I terhadap Jumlah Keluarga.
- c. Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I terhadap Jumlah Keluarga.
- d. Persentase Keluarga Sejahtera II terhadap Jumlah Keluarga.
- e. Persentase Keluarga Sejahtera III terhadap Jumlah Keluarga.
- f. Persentase Keluarga Sejahtera III Plus terhadap Jumlah Keluarga.

2.2.3.1.5. Hasil Pendataan Keluarga

Hasil Analisis Pendataan Keluarga dapat dimanfaatkan untuk melakukan Intervensi terhadap kegiatan – kegiatan operasional baik yang sedang maupun akan berjalan, serta penyusunan prioritas kegiatan operasional di Lapangan.

Berkaitan dengan itu, berikut akan dipaparkan berbagai model analisis sederhana dan perhitungannya pada :

- A. Aspek Demografi.
- B. Aspek Keluarga Berencana
- C. Aspek Tahapan Keluarga Sejahtera

Selanjutnya, hasil - hasil perhitungannya dilengkapi pula dengan Intepertasi agar para petugas dan pengelola program kependudukan dan keluarga

berencana dapat membaca dan mengetahui makna dibalik angka – angka tersebut.

Berikut ini akan digambarkan hasil pendataan keluarga baik berupa tabel maupun secara grafik :

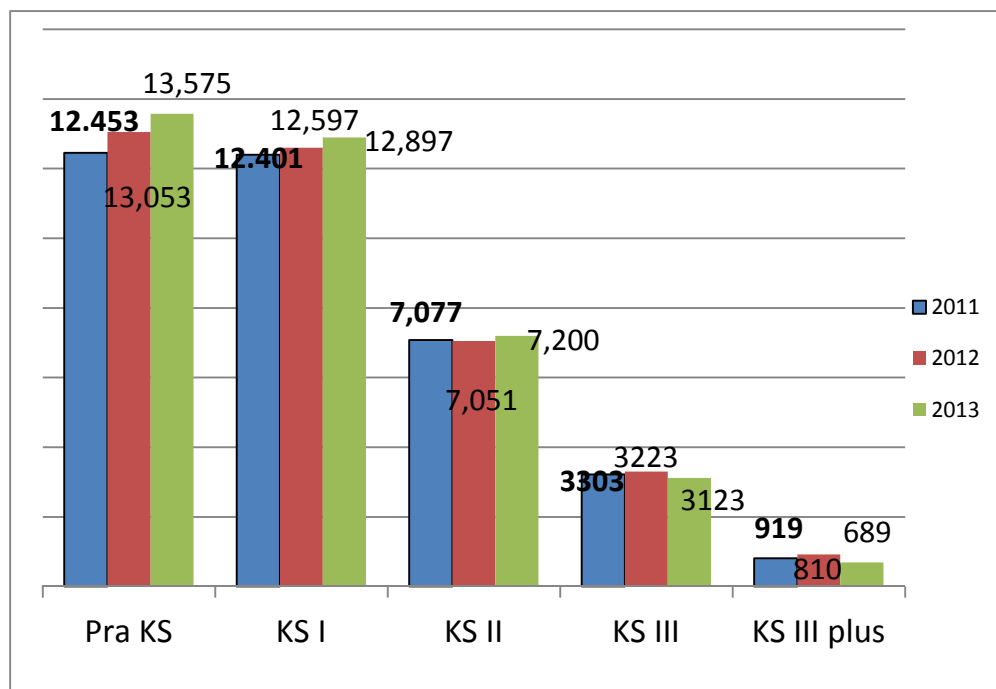
Tabel. 1

**JUMLAH HASIL TAHAPAN KELUARGA SEJAHTERA
TAHUN 2011 S/D TAHUN 2013**

No.	TAHUN	JUMLAH TAHAPAN KELUARGA				
		Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera I	Keluarga Sejahtera II	Keluarga Sejahtera III	Keluarga Sejahtera III Plus
1	Thn. 2011	12,453	12,401	7,077	3,223	810
2	Thn. 2012	13053	12597	7051	3303	919
3	Thn. 2013	13575	12897	7200	3123	689

Sumber data : Hasil pendataan keluarga

**GRAFIK DATA TAHAPAN KELUARGA SEJAHTERA
TAHUN 2011 S/D TAHUN 2013**



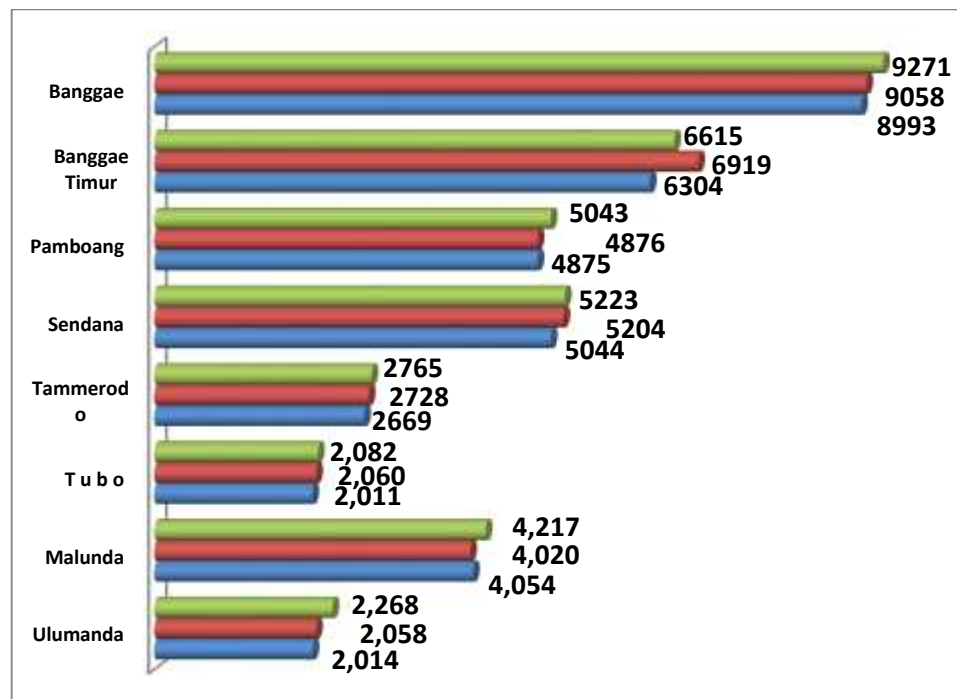
Tabel. 2

**PERBANDINGAN HASIL PENDATAAN
JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK)
TAHUN 2011 S/D TAHUN 2013**

No.	Kecamatan	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Banggae	8993	9058	9271
2	Banggae Timur	6304	6919	6615
3	Pamboang	4875	4876	5043
4	Sendana	5044	5204	5223
5	Tammerodo	2669	2728	2765
6	T u b o	2011	2060	2082
7	Malunda	4054	4020	4217
8	Ulumanda	2014	2058	2268
KABUPATEN		35964	36923	37484

Sumber data : Hasil pendataan keluarga

**GRAFIK PERBANDINGAN HASIL PENDATAAN
KEPALA KELUARGA (KK)
TAHUN 2011 S/D TAHUN 2013**



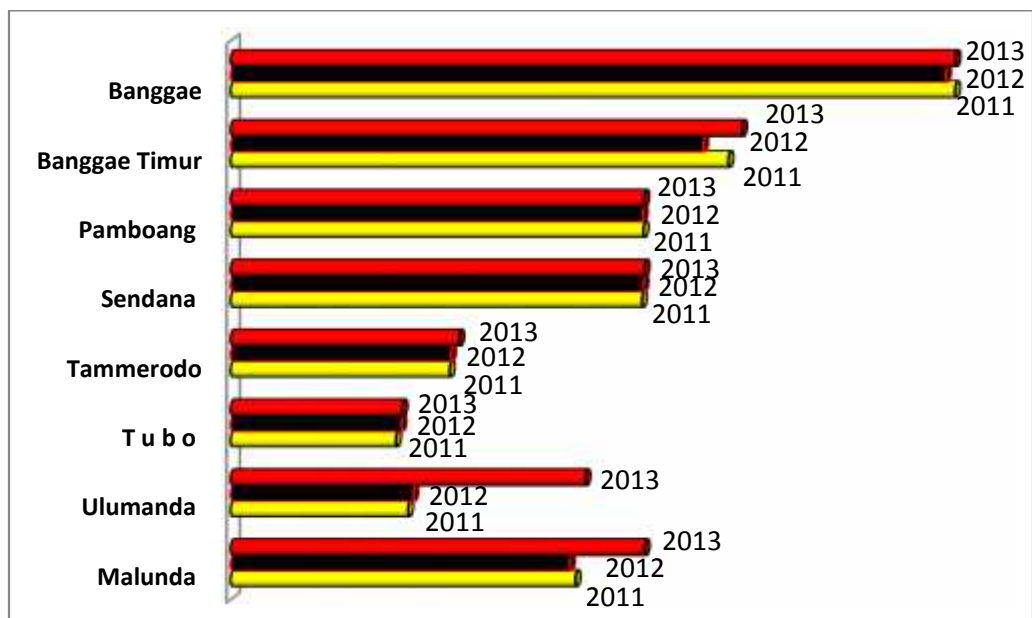
Tabel. 3

**PERBANDINGAN JUMLAH JiWA
DALAM KELUARGA
TAHUN 2011 S/D 2013**

No	Kecamatan	T a h u n					
		2011		2012		2013	
		L	P	L	P	L	P
1	Banggae	18.585	19.153	18.274	18.996	18.528	19.224
2	Banggae Timur	12.658	13.269	12.411	13.212	13.061	13.570
3	Pamboang	10.616	10.881	10.598	10.871	10.695	10.844
4	Sendana	10.342	11.085	10.511	11.003	10.525	11.031
5	T ammerodo	5.649	5.756	5.759	5.721	5.933	5.960
6	T u b o	4.227	4.376	4.518	4.376	4.542	4.398
7	Malunda	8966	8.990	8.848	8.823	9.242	9.231
8	Ulumanda	4.618	4.618	4.662	4.859	5.426	5.927
KABUPATEN		75.661	78.128	75.581	77.861	77.952	80.185

Sumber data : Hasil pendataan keluarga

**GRAFIK PERBANDINGAN
JUMLAH JiWA DALAM KELUARGA
TAHUN 2011 S/D TAHUN 2013**



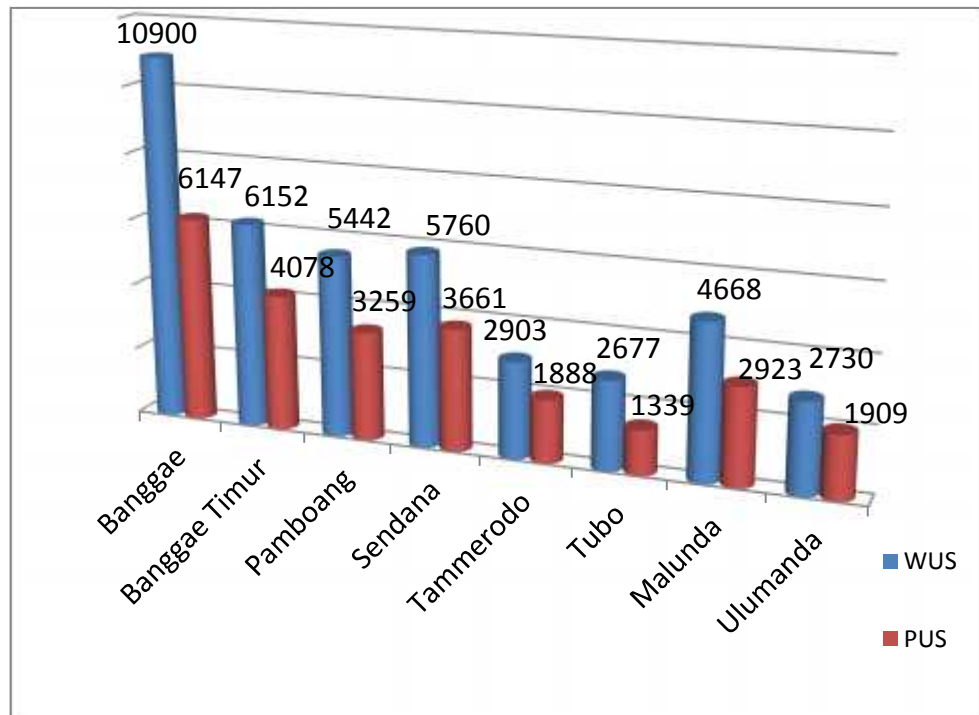
Tabel. 4

DATA JUMLAH WANITA USIA SUBUR (WUS) DAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) TAHUN 2013

No	Kecamatan	Wanita Usia Subur (WUS) (15 - 49 Thn)	Pasangan Usia Subur (PUS)
1	Banggae	10900	6147
2	Banggae Timur	6152	4078
3	Pamboang	5442	3259
4	Sendana	5760	3661
5	Tammerodo	2903	1888
6	T u b o	2677	1339
7	Malunda	4668	2923
8	Ulumanda	2730	1909
KABUPATEN		36332	25204

Sumber data : Hasil pendataan keluarga

GRAFIK JUMLAH WANITA USIA SUBUR (WUS) DAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) TAHUN 2013



Tabel. 5

**CAPAIAN PESERTA KB BARU (PB)
KABUPATEN MAJENE
BULAN JANUARI S/D JUNI 2014**

NO	KECAMATAN	PPM AB	REALISASI	% THD PPM AB
1	Banggae	1,729	675	39.05%
2	Banggae Timur	1,147	624	54.41%
3	Pamboang	917	244	26.62%
4	Sendana	1,030	363	35.26%
5	Tammerodo	531	225	42.38%
6	Tubo	377	107	28.42%
7	Malunda	822	200	24.33%
8	Ulumanda	537	148	27.57%
KABUPATEN		7,088	2,586	36.48%

Sumber data : Hasil pendataan keluarga

Tabel. 6

**PENCAPAIAN PESERTA KB BARU (PB)
MENURUT METODE KONTRASEPSI
JANUARI S/D JUNI 2014**

Jenis Alkon	KKP	Pencapaian PB		
		Jumlah	% THD PPM	% Mix
IUD	280	634	22.5	2.6
MOW	33	55	166.7	2.3
IMPLANT	766	170	22.2	7.1
SUNTIK	1,079	1,0096	101,6	45.8
PIL	4,215	799	19.0	33.4
MOP	23	6	26.1	0.3
KONDOM	692	205	29.6	8.6
Total	7,088	2,394	33.8	100.0
Pria	7715	211	29.5	8.8
Wanita	6,373	2,183	34.3	91.2
MKJP	1,102	294	26.7	12.3

Sumber data : Hasil pendataan keluarga

Tabel. 7

**PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF
BULAN JANUARI S/D JULI 2014**

NO	KECAMATAN	KKP PA	PUS LAPANGAN	REA LISASI	% THD PUS LAPANGAN	% THD PPM AB
1	Banggae	3123	6147	3876	63.06%	124.11%
2	Banggae Timur	2072	4078	2759	67.66%	133.17%
3	Pamboang	1656	3259	2017	61.89%	121.82%
4	Sendana	1860	3661	2256	61.62%	121.29%
5	Tammerodo	959	1888	1227	64.99%	127.92%
6	Tubo	680	1339	970	72.44%	142.59%
7	Malunda	1485	2923	1915	65.51%	128.95%
8	Ulumanda	970	1909	949	49.71%	97.85%
KABUPATEN		12.805	25.204	15,969	63.36%	124.71%

Sumber data : Hasil pendataan keluarga

Tabel. 8

**PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF
BULAN JANUARI S/D JULI 2014**

No.	Kecamatan	UPTD	PLKB
1	Banggae	1	3
2	Banggae Timur	1	2
3	Pamboang	1	0
4	Sendana	0	0
5	Tammerodo	1	1
6	T u b o	0	0
7	Malunda	1	0
8	Ulumanda	1	0
KABUPATEN		6	6

Sumber data : Hasil pendataan keluarga

2.2.3.2. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene merupakan suatu lompatan besar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene. Oleh karena itu salah satu bidang yang ada di BKKBD Kabupaten Majene adalah Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang di dalamnya terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pembinaan Kesertaan ber KB dan Kesehatan Reproduksi dan dibantu 8 UPT Kecamatan.

2.2.3.3. Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi

Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam Pasal 48 ayat 1 tentang Kebijakan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan dengan cara :

- a. Peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak melalui BKB.
- b. Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang

penyiapan kehidupan berkeluarga melalui BKR dan PIK-Remaja.

- c. Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga melalui BKL.

Secara umum bahwa tujuan dari pada pembinaan ini adalah mengembangkan model Percontohan BKB, BKR dan BKL yang dapat menyediakan informasi dan penyuluhan bagi keluarga dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang balita, anak, remaja serta peningkatan kualitas hidup lansia dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi anggota kelompok dan mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Secara khusus bertujuan adalah :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga/masyarakat dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang balita, anak dan remaja serta peningkatan kualitas hidup lansia.
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelompok BKB, BKR dan BKL Percontohan.
- c. Meningkatkan kemampuan petugas dalam pembinaan BKB, BKR dan BKL Percontohan.
- d. Memberikan acuan pembentukan kelompok BKB, BKR dan BKL Percontohan.

- e. Menginformasikan kepada keluarga/anggota keluarga BKB, BKR dan BKL tentang bahaya narkoba dan pergaulan bebas, apalagi sampai terjadi kehamilan di luar nikah.

Untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama dalam pelaksanaan program Bina Keluarga Balita dan Anak (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) Percontohan, maka perlu diberikan batasan pengertian sebagai berikut :

1. Keluarga.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, suami, istri dan anaknya, suami dan anaknya, istri dan anaknya.

2. Kelompok BKB dan Anak.

Wadah kegiatan keluarga yang mempunyai balita usia 0-5 tahun dan anak usia 6-10 tahun.

3. Kelompok BKR.

Wadah kegiatan keluarga yang mempunyai anak remaja usia 10-24 tahun.

4. Kelompok BKL.

Wadah kegiatan keluarga yang mempunyai lansia (lansia awal 45-55 tahun, pra lansia 56-59 tahun, lansia lebih dari 60 tahun).

5. Kelompok BKB Percontohan adalah kelompok BKB yang sudah ada dan aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok ditambah beberapa kegiatan inovatif yang memenuhi kriteria kelompok percontohan.

6. Kelompok BKR Percontohan adalah kelompok BKR yang telah memenuhi syarat dan kriteria untuk menjadi model/ccontoh bagi keluarga dan masyarakat lainnya dalam mengajak dan membina tumbuh kembang remaja dalam rangka mewujudkan Generasi Berencana.
7. Kelompok BKL Percontohan adalah kelompok yang telah memenuhi persyaratan seperti, alamat, kelompok, ketua, kader, adanya SK pembentukan yang disahkan oleh Lurah dan memiliki stratifikasi kelompok dasar, berkembang, paripurna serta melakukan pembinaan bersama Puskesmas dalam rangka mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif dan bertaqwa sehingga tetap dapat diberdayakan.

Secara garis besar bahwa kegiatan kelompok Percontohan yang akan dikembangkan dapat disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah. Kegiatan yang dimaksud yaitu kegiatan Advokasi dan KIE, yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan dan menyamakan persepsi tentang pembentukan dan mekanisme kerja kelompok Bina-bina Keluarga Percontohan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran keluarga serta masyarakat dalam membina keluarganya sehingga menjadi keluarga yang berkualitas. Kemudian kegiatan KIB Pelembagaan, dilakukan untuk memberikan dorongan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya keluarga yang memiliki balita/anak/remaja/lansia agar benar-benar memanfaatkan kelompok Bina-bina Keluarga Percontohan sebagai salah satu

wahana untuk meningkatkan pengetahuannya tentang pembinaan secara optimal.

2.2.3.4. Bidang Pengendalian Penduduk

Kondisi kependudukan masih menjadi tantangan bagi pembangunan dewasa ini. Berbagai temuan empirik menunjukkan bahwa tingkat kemajuan suatu bangsa sebagian besar ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) dan bukan oleh melimpahnya sumber daya alam (SDA). Jumlah penduduk yang besar akan bermanfaat jika kualitasnya tinggi. Sebaliknya, jika kualitasnya rendah, maka jumlah penduduk yang besar hanya akan menjadi beban pembangunan.

Pada hakekatnya pembangunan suatu daerah meliputi penilaian kualitas fisik dan non fisik. Dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan, keberhasilan pembangunan dilihat dari seberapa besar manfaat pembangunan yang telah dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat sehingga menaikkan derajat hidup mereka.

Dalam UU No. 52 tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk. Dalam beberapa hal kependudukan dan demografi erat bersinggungan bahkan sulit dibedakan keduanya, tetapi dalam

banyak hal kependudukan dan demografi secara bersama memberikan pengetahuan tentang penduduk lebih komprehensif. Demografi memerlukan kependudukan untuk menjawab sebab-akibat dari fenomena demografi. Ketika demografi menunjukkan terdapat tren pertumbuhan penduduk yang cepat, maka kependudukan harus mampu menjawab : Mengapa hal tersebut dapat terjadi ? dan apa akibatnya jika pertumbuhan penduduk sangat cepat ? dan apa rekomendasinya agar pertumbuhan penduduk stabil ?

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup, serta meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan bathin.

Hubungan antara masalah kependudukan (termasuk masalah KB) dan kesejahteraan adalah hubungan timbal balik. Di satu sisi peningkatan kesejahteraan akan menyebabkan individu atau keluarga melakukan investasi yang lebih di bidang SDM berupa upaya mendapatkan pelayanan yang lebih baik dalam perencanaan keluarga, pelayanan kehamilan dan melahirkan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Semua ini akan berdampak pada terjadinya peningkatan kualitas SDM. Di sisi lain, individu yang semakin sehat, lebih bergizi, tidak mudah terjangkit penyakit, otak lebih cerdas dan berpendidikan dapat

dipastikan akan lebih produktif dan berdampak pada peningkatan penghasilan dan kesejahteraan.

Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek, yaitu : Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk ; Kedua berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan ; Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan ; Keempat adalah data dan informasi penduduk ; Kelima adalah penyerasian kebijakan kependudukan.

Penduduk Kabupaten Majene tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,54% disbanding akhir tahun 2012, dari 158.036 jiwa menjadi 158.890 jiwa, dengan LPP dalam kurun waktu 2000-2010 adalah 1,64%. Rata-rata anggota rumah tangga 4,86, artinya setiap keluarga yang ada di Kabupaten Majene rata-rata terdiri dari 4 sampai 5 orang anggota rumah tangga. Bila dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan 5 Kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Majene mempunyai jumlah anggota rumah tangga terbesar.

Berdasarkan Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2014, kepadatan penduduk Kabupaten Majene 168 jiwa per Km², diatas angka rata-rata Provinsi dan menjadi Kabupaten terpadat kedua diantara Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.

Demikian pula dengan angka beban tanggungan di Kabupaten Majene pada tahun 2013 sebesar 61,47, lebih tinggi dari angka beban tanggungan Provinsi (57,60) dan menjadi kabupten dengan angka beban tanggungan terbesar di Provinsi Sulawesi Barat.

Tingkat fertilitas di Kabupaten Majene yang ditunjukkan dengan angka CWR (Child Woman Ratio) hasil pendataan keluarga tahun 2013, mencapai 37,24%. Demikian pula dengan AHH, Kabupaten Majene berada pada urutan ke 4 terendah diantara 5 kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Sebelum adanya pemisahan kelembagaan, dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada **Urusan Keluarga Berencana** untuk tahun anggaran 2009 sebanyak 1 program dan 12 kegiatan telah dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp. 861.098.000,- dan realisasi sebesar Rp. 813.613.000,- dengan capaian kinerja 94,49%. Untuk tahun anggaran 2010 sebanyak 1 program dan 9 kegiatan telah dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp. 1.033.169.100,- dan realisasi sebesar Rp. 963.898.700,- dengan capaian kinerja 93,30%. Untuk tahun anggaran 2011 sebanyak 1 program dan 10 kegiatan telah dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp. 1.058.860.000,- dan realisasi sebesar Rp. 995.889.000,- dengan capaian kinerja 94,05%. Untuk tahun anggaran 2012 sebanyak 1 program dan 9 kegiatan telah dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp. 1.032.707.700,- dan realisasi sebesar Rp. 967.351.000,- dengan capaian kinerja 93,67%. Untuk tahun anggaran 2013 sebanyak 1 program dan 12 kegiatan telah dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp. 1.258.506.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.073.949.200,- dengan capaian kinerja 85,34%.

Sedangkan pada **Urusan Keluarga Sejahtera** untuk tahun anggaran 2009 sebanyak 1 program dan 2 kegiatan telah dialokasikan anggaran APBD sebesar

Rp. 73.824.000,- dan realisasi sebesar Rp. 73.032.000,- dengan capaian kinerja 98,93%. Untuk tahun anggaran 2010 sebanyak 2 program dan 3 kegiatan telah dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp. 95.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 95.000.000,- dengan capaian kinerja 100%. Untuk tahun anggaran 2011 sebanyak 1 program dan 1 kegiatan telah dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp. 25.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 25.000.000,- dengan capaian kinerja 100%. Untuk tahun anggaran 2012 sebanyak 2 program dan 5 kegiatan telah dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp. 170.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 170.000.000,- dengan capaian kinerja 100%.

Dengan demikian, bahwa total anggaran APBD untuk 2 (dua) urusan yang dialokasikan tahun 2009 adalah Rp. 934.922.000,- dan realisasi sebesar Rp. 886.645.000,- dengan capaian kinerja 94,84%. Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp. 1.128.169.100,- dan realisasi sebesar Rp. 1.058.898.700,- dengan capaian kinerja 93,86. Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp. 1.083.860.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.020.889.000,- dengan capaian kinerja 94,19%. Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp. 1.122.707.700,- dan realisasi sebesar Rp. 1.057.351.000,- dengan capaian kinerja 94,18%. Sedangkan pada tahun 2013 dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp. 1.428.506.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.243.949.200,- dengan capaian kinerja 87,08%. Sehingga rata-rata pertumbuhan anggaran dalam kurun waktu 5 (tiga) tahun terakhir untuk tahun 2009 – 2013 sekitar 11,89% dan realisasi anggaran rata-rata pertumbuhannya sekitar 9,27%.

Berdasarkan program dan kegiatan serta realisasi anggaran tersebut di atas, maka akan digambarkan ke dalam tabel berikut ini :

Tabel. 1

**Jumlah Program / Kegiatan dan
Realisasi Anggaran Tahun 2009 – 2011**

1. Urusan Keluarga Berencana

No	Tahun	Jumlah		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Ket
		Program	Kegiatan				
1	2009	1	12	861.098.000	813.613.000	94,49	
2	2010	1	9	1.033.169.100	963.898.700	93,30	
3	2011	1	10	1.058.860.000	995.889.000	94,05	
4	2012	1	9	1.032.707.700	967.351.000	93,67	
5	2013	1	12	1.258.506.000	1.073.949.200	85,34	

2. Urusan Keluarga Sejahtera

No	Tahun	Jumlah		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Ket
		Program	Kegiatan				
1	2009	1	2	73.824.000	73.032.000	98,93	
2	2010	2	3	95.000.000	95.000.000	100	
3	2011	1	1	25.000.000	25.000.000	100	
4	2012	2	3	90.000.000	90.000.000	100	
5	2013	2	5	170.000.000	170.000.000	100	

Tabel. 2

Total Realisasi Anggaran Tahun 2009 – 2013

No	Tahun	Jumlah		%	Ket
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
1	2009	934.922.000	886.645.000	94,84	
2	2010	1.128.169.100	1.058.898.700	93,86	
3	2011	1.083.860.000	1.020.889.000	94,19	
4	2012	1.122.707.700	1.057.351.000	94,18	
5	2013	1.428.506.000	1.243.949.200	87,08	

Secara keseluruhan bahwa pencapaian realisasi penggunaan anggaran dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan ditambah dengan belanja tidak langsung, untuk tahun anggaran 2009 sebanyak 6 program dan 36 kegiatan dengan alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 3.405.442.580,- dan realisasi sebesar Rp. 3.331.958.358,- dengan capaian kinerja 97,84%. Untuk tahun anggaran 2010 sebanyak 8 program dan 32 kegiatan dengan alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 4.182.098.102,- dan realisasi sebesar Rp. 3.995.563.562,- dengan capaian kinerja 95,54%. Untuk tahun anggaran 2011 sebanyak 6 program dan 30 kegiatan dengan alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 4.324.750.317,- dan realisasi sebesar Rp. 4.232.103.364,- dengan capaian kinerja 97,86%. Untuk tahun anggaran 2012 sebanyak 8 program dan 36 kegiatan dengan alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 5.140.285.678,- dan realisasi sebesar Rp. 4.226.242.348,- dengan capaian kinerja 82,22%. Sementara untuk tahun anggaran 2013 sebanyak 8 program dan 41 kegiatan dengan alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 4.783.842.131,- dan realisasi sebesar Rp. 4.818.191.285,- dengan capaian kinerja 100,72%.

Hal ini berarti bahwa realisasi capaian kinerja pada tahun 2010 terjadi penurunan capaian sekitar 1,90% dari tahun sebelumnya, tahun 2011 mengalami kenaikan capaian sekitar 1,92% dari tahun sebelumnya, sementara tahun 2012 terjadi penurunan capaian sekitar 15,64% dan tahun 2013 ada kenaikan capaian sekitar 18,50%.

Berikut dapat dilihat Realisasi anggaran pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3

**Jumlah Program/Kegiatan, Realisasi Anggaran
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tahun 2009 – 2013**

No	Tahun	Jumlah		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Ket
		Program	Kegiatan				
1	2009	6	36	3.405.442.580	3.331.958.358	97,84	
2	2010	8	32	4.182.098.102	3.995.563.562	95,94	
3	2011	6	30	4.324.750.317	4.232.103.364	97,86	
4	2012	8	36	5.140.285.678	4.226.242.348	82,22	
5	2013	8	41	4.783.842.131	4.818.191.285	100,72	

Untuk data banyaknya akseptor KB baru menurut kontrasepsi yang digunakan per klinik KB tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4

**Banyaknya Akseptor KB Baru Menurut Kontrasepsi
Yang Digunakan Per - Klinik KB
Di Kabupaten Majene Tahun 2006-2010**

NO	TAHUN	JENIS KONTRASEPSI						
		IUD	PIL	KON DOM	MOP	MOW	STK	IMPLANT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2006	80	312	12	0	9	1.373	181
2.	2007	79	1.028	35	0	6	1.299	111
3.	2008	90	1.330	95	2	12	1.648	111
4.	2009	64	1.409	450	7	14	2.095	117
5.	2010	160	1.466	552	16	16	2.025	96

Untuk data pencapaian peserta KB aktif (CU) per Mix Kontrasepsi tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 5

**Pencapaian Peserta KB Aktif (CU)
Per - MIX Kontrasepsi
Dalam Kabupaten Majene Tahun 2006-2010**

NO	TAHUN	PUS PROYEKSI	TARGET	REALISASI	% TERHADAP TARGET	% TERHADAP PUS
1	2	3	4	5	6	7
1.	2006	23.216	13.910	12.850	92,39	55,35
2.	2007	22.999	13.611	13.754	101,06	59,80
3.	2008	24.210	12.679	14.875	117,36	61,46
4.	2009	24.219	15.934	15.364	96,42	63,44
5.	2010	26.091	13.029	14.800	114,57	57,22

NO	TAHUN	MIX KONTRASEPSI							
		MOW	%	MOP	%	SUN-TIKAN	%	IMP-LANT	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2006	158	40,93	0	0,00	5.795	96,56	692	107,27
2.	2007	162	37,09	0	0,00	6.293	105,15	693	109,13
3.	2008	175	23,68	9	40,00	6.681	62,98	739	62,73
4.	2009	196	193,74	9	90,00	6.766	88,68	740	62,73
5.	2010	199	49,61	25	143,89	6.578	116,36	732	100,85

Lanjutan :

Tabel. 5

NO	TAHUN	JENIS KONTRASEPSI					
		IUD	%	PIL	%	KONDOM	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2006	1.035	61,32	5.091	126,56	79	33,62
2.	2007	1.074	63,61	5.470	135,41	106	38,56
3.	2008	1.121	66,80	5.977	134,19	185	44,36
4.	2009	1.118	145,08	5.948	99,42	575	192,74
5.	2010	1.202	58,43	5.341	142,79	723	224,68

Untuk data instrument penilaian penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan hasil kerja tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 6

**Instrumen Penilaian Penyelenggaraan
Pelayanan Publik Berdasarkan Hasil Kerja
Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2006-2010**

KOMPONEN PENILAIAN	INDIKATOR	TAHUN				
		2006	2007	2008	2009	2010
Kebijakan Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan	Prosentase rata-rata peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), ke KS-3	7,09%	7,56%	9,71%	9,28%	6,44%

Untuk data banyaknya keluarga pra-sejahtera tahun 2006-2010 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 7

**Banyaknya Keluarga Pra-Sejahtera
Di Kabupaten Majene Tahun 2006-2010**

NO	TAHUN	JENIS PRA-SEJAHTERA				JUMLAH
		PRA SEJAHTERA EKONOMI+NON EKONOMI	KS I	KS II	KS III/III+	
1	2	3	4	5	6	7
1.	2006	9.580	10.953	7.990	3.026	31.549
2.	2007	10.382	10.070	8.444	3.318	32.214
3.	2008	10.179	11.137	9.156	3.817	34.289
4.	2009	11.990	11.594	7.182	3.659	34.425
5.	2010	12.524	11.785	6.945	3.929	35.183

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Pada saat penggabungan kelembagaan yaitu pada tahun 2009 – 2013 dengan Nomenklatur Badan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Majene, memberikan gambaran program dan kegiatan dalam menjalankan fungsinya yang ada yaitu sebanyak 3 (tiga) urusan diantaranya ; Urusan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana.

Sedangkan untuk tahun 2014 terjadi pemisahan kelembagaan dengan Nomenklaturnya yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene.

Pencapaian kinerja pelayanan serta anggaran dan realisasi pendanaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene pada tahun 2009 – 2013 ada pada tabal 2.1 dan tabel 2.2 sebagai berikut :

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuannya dengan melakukan metode analisis *SWOT* yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan BKKBD dan pelaksanaan pembangunan Kependudukan dan KB adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan.

1. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan KB Nasional.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene.

b. Kelemahan.

1. Sarana dan prasarana operasional penggerakan masyarakat belum memadai.
2. Jumlah staf yang masih relatif terbatas.
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) perlu ditingkatkan.

c. Peluang.

1. Komitmen pemerintah semakin tinggi terhadap pembangunan kependudukan dan KB, terbukti pada saat pelaksanaan Rakerda BKKBD Kabupaten Majene tahun 2014.
2. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan pembangunan
3. Dukungan *Stakeholders* terkait penanganan isu kependudukan.

d. Tantangan

1. Kurangnya tenaga PKB / PLKB di setiap Desa / Kelurahan. Hal ini sangat memberatkan bagi UPT di Kecamatan karena harus pula bertanggungjawab dalam pekerjaan PKB/PLKB, sehingga dalam situasi kerja tersebut mengakibatkan pengiriman laporan ke Kabupaten biasanya terlambat. Perlu diketahui bahwa jumlah PKB/PLKB pada kondisi dari tahun 2010 berjumlah 12 (dua belas) orang, tahun 2012 berkurang lagi menjadi 8 (delapan), dan untuk tahun 2014 ada 5 (lima) orang dari 82 Desa/Kelurahan di Kabupaten Majene. Hal ini disebabkan karena sebahagian mereka beralih tugas ke instansi lain, sehingga masih sangat diperlukan lagi tenaga-tenaga PKB/PLKB untuk mengisi kekosongan yang ada di Desa/Kelurahan tersebut yang merupakan ujung tombak program KKB.
2. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana, dan anggaran program KKB yang belum memadai. Dengan demikian, BKKBD harus mempunyai kemampuan dalam mengadvokasi para pemangku kepentingan agar pembangunan kependudukan dan KB menjadi program prioritas di daerah.

3. Meningkatkan pembinaan Institusi KB yang berada di lini lapangan seperti Pos Pembina KB Desa (PPKBD) dan Sub-PPKBD yang diharapkan dapat bertugas sebagai pembina peserta KB. Data menunjukkan bahwa posisi bulan April tahun 2014 tercatat sekitar 82 PPKBD dan 383 Sub-PPKBD.
4. Meningkatkan sinergitas kebijakan dalam Pembangunan Kependudukan dan KB di daerah.

